

SUKSES
JAKARTA
UNTUK
INDONESIA



**BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA**



**RANCANGAN
AKHIR RENCANA KERJA
BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH
TAHUN ANGGARAN
2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 dapat disusun tepat waktu dengan baik.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan Renja Perangkat Daerah mengacu pada hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 dan rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang telah disusun.

Kami sadari bahwa masih terdapat kekurangan yang membutuhkan perbaikan dan penyempurnaan dalam penyusunan Dokumen Renja Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta ini, baik secara substansi perencanaan pembangunan, khususnya urusan Keuangan. Oleh karena itu, rekomendasi yang konstruktif akan menjadi masukan dalam penyusunan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Pagu Indikatif, Indikator dan Target Kinerja serta penyesuaian dengan Sasaran dan Prioritas Nasional, dan identifikasi Program dan Kegiatan menurut kewenangan Provinsi dan Kota/Kabupaten di masa yang akan datang.

Kami ucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Allah SWT membalas kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja ikhlas kita dalam berkolaborasi guna membangun kota Jakarta yang kita cintai bersama ini.

Jakarta, 21 Juli 2023
Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta



Lusiana Herawati
NIP. 196706131988032002

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| KATA PENGANTAR..... | 2 |
| DAFTAR ISI..... | 3 |
| I. PENDAHULUAN | 4 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 5 |
| 1.2 Dasar Hukum Penyusunan..... | 6 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 9 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 9 |
| II. GAMBARAN DAN KONDISI UMUM..... | 11 |
| 2.1 Profil Badan Pengelolaan Aset Daerah..... | 12 |
| 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2022..... | 14 |
| 2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPAD | 33 |
| III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... | 34 |
| 3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah..... | 35 |
| 3.2 Program dan Kegiatan 2024..... | 36 |
| 3.3 Rancangan Akhir RKPD 2024 | 37 |
| IV. RENCANA KERJA | 49 |
| 4.1 Prioritas Pembangunan Tahun 2024..... | 50 |
| 4.2 Strategi dan Arah Pembangunan Wilayah | 50 |
| V. PENUTUP | 54 |



BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, penyusunan anggaran tahun 2024 meliputi Rancangan Kebijakan Umum Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024. Anggaran disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 serta Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2023-2026. RPD Tahun 2023-2026 yang disusun menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 sedangkan Renstra PD Tahun 2023-2026 yang disusun menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024.

Renja Perangkat Daerah disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, sasaran serta prakiraan maju. Renja Perangkat Daerah juga harus berpedoman pada RKPD untuk menjaga keselarasan antara program, kegiatan serta sasaran dan prioritas pembangunan daerah.

Renja Perangkat Daerah (PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Penyusunannya berpedoman pada Renstra PD 2023-2026.

Berpedoman pada RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 memiliki makna bahwa perlu adanya penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program Perangkat Daerah yang ditetapkan untuk kurun waktu jangka menengah (2023-2026). Kemudian, berpedoman pada penyusunan RKPD Tahun 2024 bermakna bahwa penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 perlu menyesuaikan koridor perencanaan Pemerintah Pusat, antara lain prioritas nasional dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 berpedoman pada RKP dan program strategis nasional berarti dalam penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 diperlukan penyelarasan prioritas pembangunan daerah, program serta kegiatan tahunan daerah dengan tema, agenda pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah dalam RKPD serta program strategis nasional lainnya.

Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Renja sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang dalam pasal 15 Ayat (1) mengamanatkan bahwa "Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah".

Proses penyusunan Renja Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta mengacu pada RKPD- Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu penyusunan Renja Badan

Pengelolaan Aset Daerah dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD-Tahun 2024. Selain itu juga dengan mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap Renja tahun sebelumnya, target kinerja tahun 2024 dalam Renstra Badan Pengelolaan Aset Daerah Tahun 2023-2026 dan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan dokumen Renja Badan Pengelolaan Aset Daerah Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

24. Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial dan/ atau Jaring Pengaman Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
31. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala daerah Berakhir pada Tahun 2022;
32. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 104);
33. Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 27);

34. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 30);
35. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33);
36. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 301);
37. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
38. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 201);
39. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah, dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
40. Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha;
41. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
42. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2015 tentang Pengenaan Kompensasi Terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2016;
43. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;
44. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah;
45. Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu;
46. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Aset Daerah;
47. Keputusan Gubernur Nomor 1959 Tahun 2018 tentang Standardisasi Usulan Kegiatan Rembuk Rukun Warga Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020);
48. Keputusan Gubernur Nomor 1959 Tahun 2018 tentang Standardisasi Usulan Kegiatan Rembuk Rukun Warga Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020);
49. Keputusan Gubernur Nomor 138 Tahun 2019 tentang Daftar Infrastruktur Khusus Kegiatan Strategis Daerah;
50. Keputusan Gubernur Nomor 1263 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah;

51. Keputusan Gubernur Nomor 43 Tahun 2022 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
52. Instruksi Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Kegiatan Swakelola Tipe III dan Tipe IV Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
53. Keputusan Gubernur Nomor 217 Tahun 2022 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
54. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 (Nomor 51013);
55. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 63003);
56. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 disusun untuk mewujudkan target kinerja tahun 2024 dengan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki. Adapun tujuan penyusunan Renja Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan Renstra Badan Pengelolaan Aset Daerah ke dalam rencana operasional tahunan;
2. Menyediakan arahan/pedoman bagi aparatur Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pengelolaan Aset Daerah Tahun 2024;
3. Menjadi alat ukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan tugas Badan Pengelolaan Aset Daerah.
4. Menyediakan prioritas pembangunan, strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan dalam penyelenggaraan anggaran di Badan Pengelolaan Aset Daerah;

1.4 Sistematika Penulisan

Sebagaimana telah diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dokumen Renja Badan Pengelolaan Aset Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM

Bab ini menjabarkan profil instansi, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan hasil pelaksanaan sampai dengan Triwulan IV tahun 2023.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menelaah arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Aset Daerah, perumusan Tujuan dan Sasaran didasarkan atas isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Badan Pengelolaan Aset Daerah, Program dan Kegiatan.

BAB IV : RENCANA KERJA

Bab ini berisi tentang garis besar rencana program dan prioritas Perangkat Daerah dalam Renja Tahun 2024.

BAB V : PENUTUP

Bab ini dijelaskan kesimpulan dari penyusunan dokumen Renja Tahun 2023 yang berisi uraian catatan penting yang perlu diperhatikan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

B A B II

GAMBARAN DAN KONDISI UMUM

SUKSES
JAKARTA
UNTUK
INDONESIA



2.1 Profil Badan Pengelolaan Aset Daerah

Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta merupakan instansi yang bertugas menyelenggarakan pengelolaan aset daerah. Fungsi dari BPAD yaitu :

1. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran BPAD;
2. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran BPAD;
3. Penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pengelolaan aset dan penyusunan harga satuan biaya barang;
4. Penyusunan daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD);
5. Pelaksanaan konsultasi teknis terkait harga satuan biaya barang dan pengendalian aset kepada SKPD/UKPD;
6. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penerimaan aset yang berasal dari hibah/bantuan;
7. Penerimaan aset dan pemenuhan kewajiban atas persetujuan prinsip perjanjian dan kontribusi tambahan lain-lain;
8. Pelaksanaan proses penetapan status penggunaan aset;
9. Pembinaan dan pengembangan pejabat fungsional aset;
10. Pengoordinasian dan pelaksanaan proses pemanfaatan aset;
11. Pengendalian hasil penjualan aset;
12. Pelaksanaan penagihan piutang daerah atas pemanfaatan aset;
13. Pengoordinasian pengamanan aset pada SKPD/UKPD;
14. Pengamanan aset yang berada pada pengelolaan barang;
15. Pengoordinasian penilaian aset;
16. Pelaksanaan proses perubahan status barang milik/dikuasai daerah;
17. Pengoordinasian dan pelaksanaan penatausahaan aset;
18. Pengoordinasian penyusunan laporan aset;
19. Pengelolaan data dan informasi aset daerah;
20. Pelaksanaan penghimpunan atas pencatatan aset yang dilakukan SKPD/UKPD;
21. Pengoordinasian pengelolaan aset yang tidak dalam penggunaan dan/atau tidak tercatat dalam neraca SKPD/UKPD tertentu;
22. Pengadaan, penatausahaan, penyimpanan, pendistribusian dan penghapusan aset yang tidak diserahkan pada SKPD/UKPD;
23. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang BPAD;
24. Pengelolaan kearsipan, data, informasi dan dokumentasi aset; dan
25. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi BPAD

Saat ini BPAD melakukan beberapa kegiatan rutin seperti Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD), Sensus BMD, dan Rekonsiliasi BMD. Kegiatan tersebut didukung oleh sistem online. Sistem tersebut dapat diakses di *website* <https://aset.jakarta.go.id/> . Terdapat beberapa sistem yang tersedia dalam *website* tersebut guna mempermudah kegiatan. Sistem terdiri dari :

1. Perencanaan
 - a. e-RKBM, yaitu sistem yang memfasilitasi dan mempermudah pengajuan perencanaan kebutuhan BMD milik Pemprov DKI Jakarta
 - b. e- Lokasi, yaitu sistem yang digunakan untuk menampilkan jumlah dan total nilai asset dari KIB A sampai dengan KIB F sesuai dengan level lokasi yang dipilih
2. Pencatatan
 - a. Sistem Inventarisasi Elektronik dan Rekonsiliasi Aset (SIERA) yaitu sistem yang memfasilitasi pencocokan laporan nilai BMD (Barang Milik Daerah) antara dua unit pemproses atau lebih terhadap sumber data yang sama.
 - b. e-Pemutakhiran, yaitu sistem yang memfasilitasi pemutakhiran data dan dokumen tahun 2021, untuk melengkapi seluruh digitalisasi data dan dokumen yang didasari oleh Permendagri Nomor 47 Tahun 2020.
 - c. e-Pengadaan, yaitu sistem yang menunjang proses pengadaan BMD
3. Penatausahaan
 - a. e-Dokumen yaitu sistem yang dibangun sebagai sarana kebutuhan data aset Pemprov DKI Jakarta yang sudah terdigitalisasi serta tersaji secara actual
 - b. e-KDO yaitu sistem yang memfasilitasi pencarian dan akses pengauran aset Kendaraan Dinas Operasional (KDO) baik perorangan maupun operasional khusus Pemprov DKI Jakarta.
 - c. e-Peta Bidang merupakan sistem yang memfasilitasi pemetaan denah letak, batas, dan luas satu atau beberapa bidang yang terintegrasi dengan Kartu Inventarisasi Barang (KIB) dan aset Peta Jakarta Satu
 - d. m-MPSA yaitu sistem yang memfasilitasi kegiatan monitoring atas tindak lanjut barang milik daerah dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
4. Pelaporan
 - a. e-Pelaporan merupakan sistem informasi yang digunakan dalam melakukan pencarian dan pencetakkan laporan pada lingkup BPAD Prov DKI Jakarta yang terintegrasi dan dapat tersaji secara aktual.
 - b. Pindai Kode dan Pencarian, sistem yang memfasilitasi pencetakkan kode sebagai identitas masing-masing BMD dan untuk melakukan pencarian BMD di lingkungan Pemprov DKI Jakarta
 - c. e-Laporan BMD yaitu sistem yang menyajikan Laporan BMD mulai dari saldo awal, mutasi semester 1, saldo akhir dan audited, sehingga BMD termonitor.
5. Penghapusan
 - a. e-Pemindahtanganan yaitu sistem yang berfungsi untuk mengajukan permohonan dan memonitoring proses pengajuan pemindahtanganan BMD Pemprov DKI Jakarta
 - b. e-Brandgang yaitu sistem yang berfungsi untuk mengajukan permohonan dan memonitoring proses pembelian tanah Brandgang secara online.
 - c. e-Persediaan yaitu sistem yang mengatur alur proses aset lancar berupa barang atau perlengkapan pendukung kegiatan operasional Pemprov DKI Jakarta

6. Pemanfaatan

- a. e-Pemanfaatan yaitu sistem pengelola BMD yang tidak digunakan sendiri dan bertujuan untuk pemasukan kas daerah
- b. e-Penggunaan yaitu sistem informasi yang dapat menunjang pengguna barang mengajukan penetapan status penggunaan BMD kepada Pengelola Barang.
- c. e-Fasos Fasum, yaitu sistem yang mendata kewajiban pihak ke-3 terhadap Pemprov DKI Jakarta

7. Pembinaan

- a. e-Pembelajaran, yaitu sistem pembelajaran daring tentang pengelolaan BMD berbasis teknologi informasi yang memungkinkan adanya interaksi pembelajaran jarak jauh antara peserta dengan pengajar / narasumber
- b. Produk Hukum yaitu sistem yang menghimpin produk hukum yang ditetapkan oleh BPAD maupun acuan peraturan lain untuk memudahkan pencarian landasan hukum terkait pengelolaan BMD di Pemprov DKI Jakarta
- c. Kanboard yaitu sistem yang mencatat kegiatan pegawai sehingga dapat disajikan dalam bentuk laporan
- d. e-SIAPPE atau Sistem Informasi Aksi Penyedia Jasa Lainnya orang Perorangan merupakan sistem yang mencatat absensi dengan menggunakan media foto dan kinerja PJLP di lingkungan BPAD.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2022

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja BPAD Provinsi DKI Jakarta tahun 2022, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Dalam pelaksanaan evaluasi dimaksud BPAD Provinsi DKI Jakarta memanfaatkan data pengukuran kinerja yang ada pada aplikasi e-SAKIP, Sementara untuk pemantauan pelaksanaan kegiatan dan anggaran bersumber dari aplikasi e-MONEV. Kedua aplikasi tersebut berisi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan pencapaian Renstra BPAD Provinsi DKI Jakarta sampai dengan Tahun 2022 sebagaimana beriku

Tabel 2.1 Evaluasi Renja 2022

| URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR | KINERJA INDIKATOR TAHUN 2022 | | | | ANGGARAN TAHUN 2022 | | |
|---|---|------------------------------|-----------|----------|---------|---------------------|----------------|-----|
| | | TARGET | SATUAN | REALSASI | % | TARGET | REALISASI | % |
| BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH | | | | | | | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | | | | | | | | |
| Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah | 100 | % | 100 | 100 | | - | |
| Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Persentase SKPD/UKPD yang melakukan Rekonsiliasi dan Inventarisasi Aset Daerah | 100 | % | 100 | 100 | 2,144,864,904 | 1,983,303,104 | 92% |
| Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | 4 | Laporan | 4 | 100 | 127,936,650 | 126,730,200 | 99% |
| Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Sub Sistem yang dikembangkan oleh BPAD | 7 | Subsistem | 7 | 100 | 2,828,867,436 | 2,786,867,436 | 99% |
| Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Peraturan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah | 8 | Peraturan | 8 | 100 | 724,784,550 | 575,292,893 | 79% |
| Pengamanan Barang Milik Daerah | Presentase Dokumen Aset Tanah Terdigitalisasi | 100 | % | 100 | 100 | 24,532,832,344 | 19,634,045,553 | 80% |
| | Jumlah bidang tanah yang dilakukan pengukuran untuk dibuat sertifikat | 23 | Bidang | 23 | 100 | | | |
| | Jumlah data aset bermasalah yang terselesaikan | 25 | Kasus | 25 | 100 | | | |
| | Jumlah gedung/bangunan yang diasuransikan | 850 | Unit | 850 | 100 | | | |
| | Jumlah aset bergerak (KDO) yang diasuransikan | 850 | Unit | 1348 | 158.588 | | | |
| Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah Penghapusan barang bergerak, barang tidak bergerak dan aset tetap lainnya milik Pemprov DKI Jakarta Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | 100 | Unit | 100 | 100 | 2,150,080,640 | 1,678,202,100 | 78% |
| | Jumlah Penghapusan barang bergerak, barang tidak bergerak dan aset tetap lainnya milik Pemprov DKI Jakarta Bidang Perekonomian dan Pembangunan | 103 | Unit | 103 | 100 | | | |

| URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR | KINERJA INDIKATOR TAHUN 2022 | | | | ANGGARAN TAHUN 2022 | | |
|---|--|------------------------------|------------|----------|-----|---------------------|----------------|------|
| | | TARGET | SATUAN | REALSASI | % | TARGET | REALISASI | % |
| | Jumlah Dokumen Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Aset | 20 | PKS | 20 | 100 | | | |
| | Persentase Pemindahtanganan dan Penghapusan Tanah dan Inbreng Aset Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | 80 | Persentase | 80 | 100 | | | |
| Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah peserta peningkatan kapabilitas pengelolaan BMD | 100 | Orang | 800 | 100 | 34,888,000 | 34,498,800 | 99% |
| Penilaian Barang Milik Daerah | Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah | 2 | Laporan | 2 | 100 | 8,066,550,000 | 7,788,452,200 | 97% |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah | Jumlah BAST aset yang terselesaikan | 130 | BAST | 130 | 100 | 819,600,000 | 808,200,000 | 99% |
| | Persentase aset fasos fasum yang terinventarisasi | 100 | % | 100 | 100 | | | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | | | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan | 4 | Indeks | 4 | 100 | | - | |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | 100 | % | 100 | 100 | 102,037,637,414 | 93,351,218,795 | 91% |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Persentase penyelesaian administrasi keuangan | 100 | % | 100 | 100 | 25,000,000 | 25,000,000 | 100% |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum | 4 | Indeks | 4 | 100 | | - | |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | Nilai Kepuasan Penyediaan Makanan dan Minuman | 4 | Nilai | 4 | 100 | 1,314,181,000 | 1,242,416,000 | 95% |
| Penyediaan Bahan/Material | Jumlah KDO yang berfungsi/dapat digunakan | 40 | Unit | 40 | 100 | 1,069,155,600 | 753,864,909 | 71% |

| URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR | KINERJA INDIKATOR TAHUN 2022 | | | | ANGGARAN TAHUN 2022 | | |
|---|--|------------------------------|---------|----------|-----|---------------------|---------------|-----|
| | | TARGET | SATUAN | REALSASI | % | TARGET | REALISASI | % |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Nilai Kepuasan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 4 | Nilai | 4 | 100 | 129,701,600 | 127,389,150 | 98% |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Nilai Kepuasan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja | 4 | Nilai | 4 | 100 | 4,601,941,907 | 4,051,834,229 | 88% |
| | Nilai Kepuasan Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) | 4 | Nilai | 4 | 100 | | | |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Nilai Kepuasan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 4 | Nilai | 4 | 100 | 4,051,960 | 2,326,560 | 57% |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indeks Kepuasan Kualitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 | Indeks | 4 | 100 | | - | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah unit KDO/KDO Khusus yang disediakan perizinannya | 40 | Unit | 40 | 100 | 626,962,564 | 446,426,416 | 71% |
| | Jumlah Unit KDO/KDO Khusus yang laik jalan/berfungsi | 40 | Unit | 40 | 100 | | | |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Nilai Kepuasan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja | 4 | Nilai | 4 | 100 | 59,182,013 | 55,388,556 | 94% |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 | Indeks | 4 | 100 | | - | |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Nilai Kepuasan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 4 | Nilai | 4 | 100 | 412,077,600 | 385,855,800 | 94% |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Kinerja Petugas Kantor/Lapangan | 19 | Laporan | 19 | 100 | 1,212,049,406 | 1,199,850,474 | 99% |
| SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH KOTA - JAKPUS | | | | | | | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN BARANGMILIK DAERAH | | | | | | | - | |
| Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah | 100 | % | 100 | 100 | | - | |

| URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR | KINERJA INDIKATOR TAHUN 2022 | | | | ANGGARAN TAHUN 2022 | | |
|---|--|------------------------------|--------|----------|-----|---------------------|-------------|-----|
| | | TARGET | SATUAN | REALSASI | % | TARGET | REALISASI | % |
| Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Persentase Penilaian dan Penghapusan Aset Tetap Barang Milik Daerah Selain Tanah, Bangunan dan KDO Lingkup Kota Administrasi Jakarta Pusat | 100 | % | 100 | 100 | 5,844,800 | 4,440,000 | 76% |
| Pengamanan Barang Milik Daerah | Jumlah Aset Tanah Yang Dipagar | 5 | Lokasi | 5 | 100 | 870,318,449 | 635,912,513 | 73% |
| | Jumlah Bidang Tanah Yang Disertifikasi" | 20 | Bidang | 20 | 100 | | | |
| | Jumlah Titik Lokasi Pemasangan Papan Nama Aset | 35 | Titik | 35 | 100 | | | |
| Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Persentase Aset Daerah yang teridentifikasi dan tercatat dalam e-aset | 100 | % | 100 | 100 | 499,200,000 | 494,400,000 | 99% |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | | - | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan | 4 | Indeks | 4 | 100 | | - | |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan | 100 | % | 100 | 100 | 3,516,000 | 3,000,000 | 85% |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum | 4 | Indeks | 4 | 100 | | - | |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Nilai Kepuasan Pelayanan Kantor Terhadap Perlengkapan Kantor | 4 | Nilai | 4 | 100 | 47,278,220 | 46,819,300 | 99% |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | Nilai kepuasan Pelayanan Kantor Terhadap Penyediaan Makanan dan Minuman | 4 | Nilai | 4 | 100 | 240,172,000 | 230,192,000 | 96% |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Nilai Kepuasan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 4 | Nilai | 4 | 100 | 41,706,500 | 40,737,000 | 98% |

| URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR | KINERJA INDIKATOR TAHUN 2022 | | | | ANGGARAN TAHUN 2022 | | |
|--|--|------------------------------|--------|----------|-----|---------------------|---------------|------|
| | | TARGET | SATUAN | REALSASI | % | TARGET | REALISASI | % |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indeks Kepuasan Kualitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 | Indeks | 4 | 100 | | - | |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Nilai Kepuasan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja | 4 | Nilai | 4 | 100 | 47,049,398 | 44,770,000 | 95% |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Pengolahan Air Limbah di Gedung Graha Mental Spiritual | 4 | Nilai | 4 | 100 | 2,668,962,596 | 2,626,129,071 | 98% |
| | Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung/Kantor | 4 | Nilai | 4 | 100 | | | |
| | Nilai Kepuasan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 4 | Nilai | 4 | 100 | | | |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Nilai Kepuasan Pelayanan Terhadap Penyediaan Jasa Petugas Penujang Kegiatan Kantor | 4 | Nilai | 4 | 100 | 998,816,901 | 966,067,013 | 97% |
| | Nilai Kepuasan Pemeliharaan dan Pengadaan Perlengkapan AC/ME dan Genset | 4 | Nilai | 4 | 100 | | | |
| | Nilai Kepuasan Pemeliharaan Rutin Lift | 4 | Nilai | 4 | 100 | | | |
| | Nilai Kepuasan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4 | Nilai | 4 | 100 | | | |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang dilakukan pengisian | 34 | Buah | 34 | 100 | 7,212,964 | 7,203,056 | 100% |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 | Indeks | 4 | 100 | | - | |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Nilai kepuasan pelayanan terhadap Penyediaan Jasa Telepon, air, listrik, (TALI) | 4 | Nilai | 4 | 100 | 1,680,000,000 | 1,584,725,786 | 94% |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Nilai Kepuasan Pelayanan Terhadap Penyediaan Jasa Petugas Penujang Kegiatan Kantor | 4 | Nilai | 4 | 100 | 2,743,059,182 | 2,692,832,916 | 98% |

| URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR | KINERJA INDIKATOR TAHUN 2022 | | | | ANGGARAN TAHUN 2022 | | |
|---|--|------------------------------|---------|----------|-----|---------------------|---------------|------|
| | | TARGET | SATUAN | REALSASI | % | TARGET | REALISASI | % |
| | Nilai Kepuasan Layanan Penyediaan jasa dan Pengadaan Perlengkapan Keamanan | 4 | Nilai | 4 | 100 | | | |
| SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH KOTA - JAKUT | | | | | | | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | | | | | | | - | |
| Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah | 100 | % | 100 | 100 | | - | |
| Pengamanan Barang Milik Daerah | Jumlah Titik Lokasi Pemasangan Papan Nama Aset | 35 | Titik | 35 | 100 | 1,438,481,935 | 1,125,360,989 | 78% |
| | Jumlah Lokasi Aset Tanah yang dipagar | 3 | Lokasi | 3 | 100 | | | |
| Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Persentase Penilaian Penghapusan Barang Inventaris Kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | 100 | % | 100 | 100 | 11,689,600 | - | 0% |
| Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Tersedianya laporan hasil Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dengan satuan jumlah laporan | 84 | Laporan | 84 | 100 | 436,800,000 | 428,400,000 | 98% |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | | - | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan | 4 | Indeks | 4 | 100 | | - | |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Nilai kepuasan pelayanan kantor terhadap penyediaan jasa administrasi keuangan | 4 | Nilai | 4 | 100 | 3,710,000 | 3,710,000 | 100% |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum | 4 | Indeks | 4 | 100 | | - | |

| URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR | KINERJA INDIKATOR TAHUN 2022 | | | | ANGGARAN TAHUN 2022 | | |
|--|---|------------------------------|---------|----------|-----|---------------------|---------------|------|
| | | TARGET | SATUAN | REALSASI | % | TARGET | REALISASI | % |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Nilai kepuasan pelayanan kantor terhadap perlengkapan kantor | 4 | Nilai | 4 | 100 | 38,347,540 | 38,305,889 | 100% |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | Nilai kepuasan pelayanan kantor terhadap Penyediaan Makanan dan Minuman | 4 | Nilai | 4 | 100 | 22,484,800 | 22,484,800 | 100% |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Nilai Kepuasan Pelayanan Terhadap Kebutuhan Kantor Cetak dan Penggandaan | 4 | Nilai | 4 | 100 | 12,243,330 | 12,231,087 | 100% |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indeks Kepuasan Kualitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 | Indeks | 4 | 100 | | - | |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Nilai Kepuasan Pelayanan Kantor Terhadap Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 4 | Nilai | 4 | 100 | 57,023,582 | 56,573,151 | 99% |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Nilai Kepuasan Layanan Kebersihan Kantor BP3W | 4 | Nilai | 4 | 100 | 1,447,825,709 | 1,240,205,784 | 86% |
| | Nilai Kepuasan Layanan Penyediaan Perlengkapan Alat Kebersihan Gedung Kantor Eks BP3W | 4 | Nilai | 4 | 100 | | | |
| | Jumlah gedung yang dikelola BPAD Prov DKI Jakarta yang dilakukan pemeliharaan/rehab | 1 | Gedung | 1 | 100 | | | |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Laporan Kinerja Petugas Kantor/Lapangan Pekerja Mekanikal Elektrikal Gedung Eks BP3W | 24 | Laporan | 24 | 100 | 209,791,911 | 205,265,435 | 98% |
| | Nilai Kepuasan Layanan Mekanikal Elektrikal | 4 | Nilai | 4 | 100 | | | |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah tabung APAR yang dilakukan pengisian ulang | 11 | Tabung | 11 | 100 | 2,475,660 | 2,473,184 | 100% |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 | Indeks | 4 | 100 | | - | |

| URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR | KINERJA INDIKATOR TAHUN 2022 | | | | ANGGARAN TAHUN 2022 | | |
|--|---|------------------------------|---------|----------|-----|---------------------|---------------|-----|
| | | TARGET | SATUAN | REALSASI | % | TARGET | REALISASI | % |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Nilai Kepuasan Layanan Keamanan Kantor Gedung BP3W | 4 | Nilai | 4 | 100 | 765,504,888 | 761,099,860 | 99% |
| | Jumlah Laporan Kinerja Petugas Kantor/Lapangan Pekerja Harian Lepas (PHL) Bidang Teknis/Administrasi | 60 | Laporan | 60 | 100 | | | |
| SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH KOTA - JAKBAR | | | | | | | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | | | | | | | | |
| Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase SKPD/UKPD yang melakukan Rekonsiliasi dan Inventarisasi Aset Daerah | 100 | % | 100 | 100 | | - | |
| Pengamanan Barang Milik Daerah | Jumlah lokasi tanah yang dilakukan pemagaran | 6 | Lokasi | 6 | 100 | 3,258,367,454 | 2,285,969,275 | 70% |
| | Jumlah papan nama aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | 50 | Unit | 50 | 100 | | | |
| Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Tersedianya laporan hasil Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 1 | Laporan | 1 | 100 | 12,858,560 | - | 0% |
| | Persentase Penilaian Penghapusan Barang Inventaris Kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | 100 | % | 100 | 100 | | | |
| Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Tersedianya laporan hasil Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah, | 1 | Laporan | 1 | 100 | 748,800,000 | 741,600,000 | 99% |
| | Persentase SKPD/UKPD yang melakukan Rekonsiliasi dan Inventarisasi Aset Daerah | 100 | % | 100 | 100 | | | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | | | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum | 4 | Indeks | 4 | 100 | | - | |

| URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR | KINERJA INDIKATOR TAHUN 2022 | | | | ANGGARAN TAHUN 2022 | | |
|--|---|------------------------------|---------|----------|-----|---------------------|---------------|-----|
| | | TARGET | SATUAN | REALSASI | % | TARGET | REALISASI | % |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Nilai Kepuasan Terhadap Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 4 | Nilai | 4 | 100 | 45,615,169 | 43,531,203 | 95% |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Nilai Kepuasan Terhadap Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 4 | Nilai | 4 | 100 | 24,362,547 | 23,935,485 | 98% |
| Fasilitas Kunjungan Tamu | Nilai Kepuasan Penyediaan Makanan dan Minuman | 4 | Nilai | 4 | 100 | 100,320,000 | 93,978,000 | 94% |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 | Indeks | 4 | 100 | | - | |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Nilai Kepuasan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja | 4 | Nilai | 4 | 100 | 79,569,875 | 78,279,420 | 98% |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indeks Kepuasan Kualitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 | Indeks | 4 | 100 | | - | |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Kinerja Petugas Kantor/Lapangan | 12 | Laporan | 12 | 100 | 448,559,729 | 443,703,782 | 99% |
| SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH KOTA - JAKSEL | | | | | | | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | | | | | | | - | |
| Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah | 100 | % | 100 | 100 | | - | |
| Pengamanan Barang Milik Daerah | Jumlah Titik Lokasi Pemasangan Papan Nama Aset | 100 | Titik | 100 | 100 | 1,606,835,582 | 1,311,208,257 | 82% |
| | Jumlah Lokasi Aset Tanah yang Dipagar | 1 | Lokasi | 1 | 100 | | | |
| Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah UKPD yang melakukan Rekonsiliasi dan Inventarisasi Aset Daerah lingkup Kota Administrasi Jakarta Selatan | 140 | UKPD | 140 | 100 | 499,200,000 | 494,400,000 | 99% |
| Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, | Persentase Penilaian Penghapusan Barang Inventaris Kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | 100 | % | 100 | 100 | 113,844,800 | 112,440,000 | 99% |

| URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR | KINERJA INDIKATOR TAHUN 2022 | | | | ANGGARAN TAHUN 2022 | | |
|--|--|------------------------------|--------|----------|-----|---------------------|---------------|------|
| | | TARGET | SATUAN | REALSASI | % | TARGET | REALISASI | % |
| Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | | | | | | | | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | | - | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan | 4 | Indeks | 4 | 100 | | | |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Nilai kepuasan terhadap penyediaan jasa administrasi keuangan | 4 | Nilai | 4 | 100 | 4,000,000 | 3,992,900 | 100% |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum | 4 | Indeks | 4 | 100 | | - | |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Nilai Kepuasan terhadap Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) | 4 | Nilai | 4 | 100 | 40,062,176 | 39,761,865 | 99% |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | Nilai kepuasan terhadap penyediaan makanan dan minuman | 4 | Nilai | 4 | 100 | 136,488,000 | 135,942,500 | 100% |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Nilai kepuasan terhadap penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 4 | Nilai | 4 | 100 | 11,293,260 | 11,202,120 | 99% |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Nilai kepuasan terhadap penyediaan bahan-bahan kebersihan | 4 | Nilai | 4 | 100 | 374,153,055 | 355,142,284 | 95% |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indeks Kepuasan Kualitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 | Indeks | 4 | 100 | | - | |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Nilai Kepuasan Terhadap Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja | 4 | Nilai | 4 | 100 | 77,020,405 | 75,103,339 | 98% |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Nilai Kepuasan Terhadap Penyediaan Jasa Kebersihan | 4 | Nilai | 4 | 100 | 2,882,374,382 | 2,844,792,361 | 99% |
| | Nilai Kepuasan Terhadap Penyediaan Jasa Pengolahan Limbah | 4 | Nilai | 4 | 100 | | | |

| URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR | KINERJA INDIKATOR TAHUN 2022 | | | | ANGGARAN TAHUN 2022 | | |
|---|--|------------------------------|--------|----------|-----|---------------------|---------------|-----|
| | | TARGET | SATUAN | REALSASI | % | TARGET | REALISASI | % |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Nilai Kepuasan Terhadap Pemeliharaan AC | 4 | Nilai | 4 | 100 | 50,844,222 | 39,245,716 | 77% |
| | Nilai Kepuasan Terhadap Pengadaan dan Pemasangan Lift | 4 | Nilai | 4 | 100 | | | |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang dilakukan pengisian | 107 | Unit | 107 | 100 | 46,904,660 | 45,954,031 | 98% |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 | Indeks | 4 | 100 | | - | |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Nilai kepuasan pelayanan terhadap penyediaan jasa telepon, air, listrik (TALI) | 4 | Nilai | 4 | 100 | 1,777,597,932 | 1,343,281,680 | 76% |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Nilai kepuasan terhadap penyediaan jasa penunjang kantor | 4 | Nilai | 4 | 100 | 2,327,676,839 | 2,298,896,047 | 99% |
| SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH KOTA - JAKTIM | | | | | | | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | | | | | | | - | |
| Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah | 4 | Indeks | 4 | 100 | | - | |
| Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Persentase SKPD/UKPD yang melakukan Rekonsiliasi dan Inventarisasi Aset Daerah | 100 | % | 100 | 100 | 748,800,000 | 741,600,000 | 99% |
| Pengamanan Barang Milik Daerah | Jumlah papan nama aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tersedia | 110 | Unit | 110 | 100 | 2,307,734,400 | 1,960,430,103 | 85% |
| | Jumlah tanah aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dilakukan pemagaran | 5 | Lokasi | 5 | 100 | | | |
| Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan | Persentase ketepatan waktu penyelesaian tindak lanjut usulan permohonan penjualan dan penghapusan Barang Bergerak, Barang Tidak Bergerak dan Aset Tetap lainnya * | 100 | % | 100 | 100 | 5,844,800 | - | 0% |

| URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR | KINERJA INDIKATOR TAHUN 2022 | | | | ANGGARAN TAHUN 2022 | | |
|--|---|------------------------------|---------|----------|-----|---------------------|---------------|------|
| | | TARGET | SATUAN | REALSASI | % | TARGET | REALISASI | % |
| Penghapusan Barang Milik Daerah | Persentase Penilaian Penghapusan Barang Inventaris Kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | 100 | % | 100 | 100 | | | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | | - | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan | 4 | Indeks | 4 | 100 | | - | |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Nilai Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan * | 4 | Indeks | 4 | 100 | 7,460,000 | 7,460,000 | 100% |
| | Persentase penyelesaian administrasi keuangan | 100 | % | 100 | 100 | | | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum | 4 | Indeks | 4 | 100 | | - | |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Nilai kepuasan pelayanan kantor terhadap ketersediaan barang cetakan dan penggandaan | 4 | Poin | 4 | 100 | 8,333,853 | 7,887,771 | 95% |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | Nilai kepuasan layanan kantor terhadap ketersediaan makanan dan minuman | 4 | Poin | 4 | 100 | 183,194,000 | 182,996,000 | 100% |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Nilai kepuasan pelayanan kantor terhadap ketersediaan alat tulis kantor | 4 | Poin | 4 | 100 | 49,908,287 | 49,871,829 | 100% |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indeks Kepuasan Kualitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 | Indeks | 4 | 100 | | - | |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Nilai Kepuasan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja | 4 | Poin | 4 | 100 | 49,507,084 | 49,282,335 | 100% |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Nilai Kepuasan kinerja Petugas Kebersihan Gedung Kantor Gedung LVRI * | 4 | Poin | 4 | 100 | 1,056,585,170 | 1,027,445,860 | 97% |
| | Jumlah laporan kinerja Petugas Kebersihan Gedung Kantor Gedung LVRI | 12 | Laporan | 12 | 100 | | | |
| | Nilai Kepuasan Penyediaan pengadaan perlengkapan kebersihan kantor | 4 | Poin | 4 | 100 | | | |

| URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR | KINERJA INDIKATOR TAHUN 2022 | | | | ANGGARAN TAHUN 2022 | | |
|--|---|------------------------------|---------|----------|-----|---------------------|---------------|-----|
| | | TARGET | SATUAN | REALSASI | % | TARGET | REALISASI | % |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Nilai Kepuasan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 4 | Poin | 4 | 100 | 2,431,877,372 | 1,969,431,298 | 81% |
| | Nilai Kepuasan Pengadaan dan Pemasangan Lift Gedung LVRI Provinsi DKI Jakarta | 4 | Poin | 4 | 100 | | | |
| | Nilai Kepuasan Kinerja Petugas Mekanikal Elektrik Gedung Kantor Gedung LVRI Provinsi DKI Jakarta * | 4 | Poin | 4 | 100 | | | |
| | Jumlah Laporan Kinerja Petugas Mekanikal Elektrik Gedung Kantor Gedung LVRI Provinsi DKI Jakarta | 12 | Laporan | 12 | 100 | | | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 | Indeks | 4 | 100 | | - | |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Nilai kepuasan pelayanan terhadap Penyediaan Jasa Telepon, air, listrik, (TALI) | 4 | Poin | 4 | 100 | 522,977,280 | 435,616,438 | 83% |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Nilai Kepuasan kinerja Petugas Keamanan Gedung Kantor * | 4 | Indeks | 4 | 100 | 1,036,955,450 | 1,016,514,462 | 98% |
| | Jumlah Laporan kinerja Petugas Keamanan Gedung Kantor LVRI | 12 | Laporan | 12 | 100 | | | |
| | Nilai Kepuasan kinerja petugas kantor /lapangan Suban Pengelolaan Aset Daerah Kota Adm. Jakarta Timur * | 4 | Indeks | 4 | 100 | | | |
| | Jumlah Laporan kinerja petugas kantor /lapangan Suban Pengelolaan Aset Daerah Kota Adm. Jakarta Timur | 12 | Laporan | 12 | 100 | | | |
| SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH KABUPATEN - KEP SERIBU | | | | | | | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | | | | | | | - | |
| Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah | 100 | % | 100 | 100 | | - | |

| URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR | KINERJA INDIKATOR TAHUN 2022 | | | | ANGGARAN TAHUN 2022 | | |
|---|--|------------------------------|---------|----------|-----|---------------------|---------------|------|
| | | TARGET | SATUAN | REALSASI | % | TARGET | REALISASI | % |
| Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Persentase SKPD/UKPD yang melakukan Rekonsiliasi dan Inventarisasi Aset Daerah | 100 | % | 100 | 100 | 268,419,735 | 265,350,000 | 99% |
| Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah laporan kegiatan penghapusan BMD diwilayah Kabupaten Kepulauan Seribu | 1 | Dokumen | 1 | 100 | 18,819,735 | 18,759,000 | 100% |
| Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase monitoring Prasarana Sarana dan Utilitas Umum yang sudah diserahkan pengembang kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | 100 | % | 100 | 100 | 37,639,470 | 34,396,236 | 91% |
| | Persentase Monitoring Pemenuhan Kewajiban Pihak Ketiga Atas Pemanfaatan Barang Milik Daerah | 100 | % | 100 | 100 | | | |
| Pengamanan Barang Milik Daerah | Jumlah papan nama aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tersedia | 60 | Unit | 60 | 100 | 1,225,434,426 | 1,056,051,826 | 86% |
| | Jumlah aset tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang di beri pagar pengamanan | 1 | Lokasi | 1 | 100 | | | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | | - | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan | 4 | Indeks | 4 | 100 | | - | |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Nilai Kepuasan Penatausahaan Keuangan | 4 | Nilai | 4 | 100 | 3,130,000 | 3,130,000 | 100% |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum | 4 | Indeks | 4 | 100 | | - | |

| URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR | KINERJA INDIKATOR TAHUN 2022 | | | | ANGGARAN TAHUN 2022 | | |
|--|---|------------------------------|--------|----------|-----|---------------------|------------|------|
| | | TARGET | SATUAN | REALSASI | % | TARGET | REALISASI | % |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Nilai kepuasan pelayanan kantor terhadap ketersediaan alat tulis kantor | 4 | Nilai | 4 | 100 | 39,399,635 | 39,323,914 | 100% |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Nilai kepuasan pelayanan kantor terhadap Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 4 | Nilai | 4 | 100 | 8,359,945 | 8,033,514 | 96% |
| Fasilitas Kunjungan Tamu | Nilai kepuasan terhadap penyediaan makanan dan minuman | 4 | Nilai | 4 | 100 | 69,434,090 | 69,311,200 | 100% |
| | Nilai kepuasan terhadap pelayanan penyediaan rumah untuk keperluan dinas | 4 | Nilai | 4 | 100 | | | |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Nilai kepuasan penyediaan peralatan rumah tangga kantor | 4 | Nilai | 4 | 100 | 23,527,207 | 22,860,450 | 97% |
| | Nilai Kepuasan Penyediaan Alat Keselamatan Kerja Pegawai | 4 | Nilai | 4 | 100 | | | |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Nilai kepuasan pelayanan kantor terhadap Penyediaan Jasa Transportasi Perairan | 4 | Nilai | 4 | 100 | 89,796,889 | 88,837,659 | 99% |
| | Nilai kepuasan pelayanan kantor terhadap Penyediaan Jasa Video Conference | 4 | Nilai | 4 | 100 | | | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indeks Kepuasan Kualitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 | Indeks | 4 | 100 | | - | |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Nilai kepuasan pelayanan kantor terhadap Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 4 | Nilai | 4 | 100 | 7,351,124 | 7,343,760 | 100% |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 | Indeks | 4 | 100 | | 0 | |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Nilai kepuasan pelayanan kantor terhadap penyediaan jasa penunjang kegiatan kantor | 4 | Nilai | 4 | 100 | 63,792,074 | 63,129,218 | 99% |
| PUSAT PENYIMPANAN BARANG DAERAH | | | | | | | - | |

| URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR | KINERJA INDIKATOR TAHUN 2022 | | | | ANGGARAN TAHUN 2022 | | |
|---|--|------------------------------|--------|----------|-----|---------------------|-------------------|------|
| | | TARGET | SATUAN | REALSASI | % | TARGET | REALISASI | % |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | | - | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum | 4 | Indeks | 4 | 100 | | - | |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Nilai Kepuasan Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) | 4 | Nilai | 4 | 100 | 32,371,075 | 31,652,804 | 98% |
| Penyediaan Bahan/Material | Nilai Kepuasan Pemenuhan Kebutuhan BBM dan Material Lainnya | 4 | Nilai | 4 | 100 | 4,347,362,660 | 4,347,362,660 | 100% |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | Nilai Kepuasan Penyediaan Makanan dan Minuman | 4 | Nilai | 4 | 100 | 51,304,160 | 50,812,102 | 99% |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indeks Kepuasan Kualitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 | Nilai | 4 | 100 | | 0 | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Nilai Kepuasan Pemeliharaan KDO/KDO Khusus | 4 | Nilai | 4 | 100 | 2,887,464,232 | 2,417,069,613 | 84% |
| | Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Jalan/Tol KDO/KDO Khusus | 4 | Nilai | 4 | 100 | | | |
| | Nilai Kepuasan Perizinan KDO/KDO Khusus | 4 | Nilai | 4 | 100 | | | |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Nilai Kepuasan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja | 4 | Nilai | 4 | 100 | 58,254,471 | 55,227,905 | 95% |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Nilai Kepuasasn layanan kebersihan kantor | 4 | Nilai | 4 | 100 | 1,274,268,687 | 1,257,817,412 | 99% |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Indeks Kepuasan Kualitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 | Indeks | 4 | 100 | | 0 | |
| Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 4 | Unit | 4 | 100 | 2,968,545,586 | 1,989,200,000 | 67% |

| URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR | KINERJA INDIKATOR TAHUN 2022 | | | | ANGGARAN TAHUN 2022 | | |
|---|--|------------------------------|---------|----------|-----|---------------------|---------------|-----|
| | | TARGET | SATUAN | REALSASI | % | TARGET | REALISASI | % |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 | Indeks | 4 | 100 | | 0 | |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Nilai kepuasan pelayanan terhadap Penyediaan Jasa Telepon, air, listrik, (TALI) | 4 | Nilai | 4 | 100 | 401,805,120 | 398,830,292 | 99% |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Kinerja Petugas Kantor/Lapangan | 12 | Laporan | 12 | 100 | 2,698,071,663 | 2,519,523,938 | 93% |
| | Nilai Kepuasan Layanan Penyediaan jasa dan Pengadaan Perlengkapan Keamanan | 4 | Nilai | 4 | 100 | | | |

Berdasarkan hasil evaluasi Renja BPAD dan UKPD dibawahnya pada Tahun Anggaran 2022, kesimpulan yang dapat dihasilkan adalah sebagai berikut :

1. Pada evaluasi Renja BPAD dan UKPD dibawahnya pada Tahun Anggaran 2022, dari total 2 program dan 6 kegiatan secara keseluruhan sudah memenuhi target indikator tahun 2022. Namun dalam realisasi anggaran, rata rata realisasi anggaran hanya 91%.
2. Subkegiatan yang belum mencapai target realisasi anggaran (kurang dari 90%) meliputi :
 - a. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah dengan capaian 0% pada Suban Aset Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat
 - b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan capaian 57% pada BPAD
 - c. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional; atau lapangan dengan capaian 67% pada Pusat Penyimpanan Barang Daerah (PPBD)
 - d. Pengamanan Barang Milik Daerah dengan capaian 70% pada Suban Aset Jakarta Barat
 - e. Penyediaan Bahan / Material dan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan capaian 71% pada BPAD
 - f. Pengamanan Barang Milik Daerah dengan capaian 73% pada Suban Aset Jakarta Pusat
 - g. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah dengan capaian 76% pada Suban Aset Jakarta Pusat
 - h. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan capaian 76% pada Suban Aset Jakarta Selatan
 - i. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan capaian 77% pada Suban Aset Jakarta Selatan
 - j. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah dengan capaian 78% pada BPAD
 - k. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan capaian 79% pada BPAD
 - l. Pengamanan Barang Milik Daerah dengan capaian 80% pada BPAD
 - m. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan capaian 81% pada Suban Aset Jakarta Timur
 - n. Pengamanan Barang Milik Daerah dengan capaian 82% pada Suban Aset Jakarta Selatan
 - o. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan capaian 83% pada Suban Aset Jakarta Timur
 - p. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan capaian 84% pada PPBD
 - q. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan capaian 85% pada Suban Aset Jakarta Pusat
 - r. Pengamanan Barang Milik Daerah dengan capaian 85% pada Suban Aset Jakarta Timur

- s. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan capaian 86% pada Suban Aset Jakarta Utara
- t. Pengamanan Barang Milik Daerah dengan capaian 86% pada Suban Aset Kepulauan Seribu
- u. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan capaian 88% pada BPAD

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPAD

Penentuan Isu-Isu Strategis

1. Upaya pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil Audit Laporan Keuangan yang dilakukan oleh BPK.
2. Peningkatan Kualitas Aparatur Pengelolaan Aset Daerah:
 - a. Persentase SDM yang memiliki keahlian penatausahaan aset daerah;
 - b. Jumlah SDM mengikuti pelatihan/pendidikan.
3. Peningkatan Kinerja BPAD:
 - a. Tingkat pencapaian kinerja kegiatan tahunan;
 - b. Persentase rata-rata tingkat kehadiran SDM BPAD.
4. Peningkatan kualitas dokumen penatausahaan aset daerah:
 - a. Peningkatan persentase pencatatan dan inventarisasi aset dalam dokumen Daftar Barang Pengguna (DBP), Daftar Barang Pengelola (DBPL) dan Daftar Barang Milik Daerah (DBMD);
 - b. Tingkat kesesuaian antara Daftar Barang Pengelola (DBPL) dan Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) dengan kondisi BMD di lapangan.
5. Peningkatan akurasi kesesuaian program dan kegiatan pengelolaan aset daerah:
 - a. Akurasi kesesuaian antara program dan kegiatan pengelolaan aset daerah;
 - b. Akurasi kesesuaian antara indikator kinerja RPJMD dan Renstra dengan RKPD dan APBD.
6. Peningkatan kualitas pelaporan pengelolaan aset daerah:
 - a. Pemanfaatan/artikulasi hasil penatausahaan dan pelaporan aset dalam pelaksanaan aktivitas penyusunan RKBMD, penetapan status aset, penggunaan aset, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan aset dan penyusunan laporan keuangan;
 - b. Penyelesaian aset daerah yang bermasalah.
7. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan aset daerah:
 - a. Peningkatan persentase PAD atas aktivitas pemanfaatan aset daerah;
 - b. Peningkatan persentase penagihan piutang pemanfaatan aset daerah



BAB III



TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan RPD yang menjadi acuan BPAD yaitu Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas sedangkan Sasaran RPD yang digunakan oleh BPAD yaitu Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel. Rencana Strategis Tahun 2023-2026, di mana tujuannya adalah Terwujudnya Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel dan sasarannya adalah Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah melalui Optimalisasi Pemanfaatan Aset, Penagihan Piutang, Penyelesaian Kewajiban Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, dan Pengamanan Barang Milik Daerah. Tujuan Renstra BPAD tertuang dalam Tabel 3.1

Tabel 3.1 Tujuan Renstra Badan Pengelolaan Aset Daerah Tahun 2023-2026

| NO | TUJUAN RENSTRA | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- | | | |
|----|--|--|--|--|------|------|------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas | Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel | Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah | 4 | 4 | 4 | 4 |

Dalam tujuan renstra, terdapat definisi operasional yang digunakan yakni Akumulasi nilai Piutang tertagih, Usulan PKS Pemanfaatan BMD, SKPD tertib Pengelolaan BMD, Penyelesaian Fasos-fasum dari Pihak Ketiga dan Aset daerah teridentifikasi dan tercatat dalam e-aset. Metode Pengukuran: $(0.2 \times \% \text{pemanfaatan aset idle}) + (0.2 \times \% \text{Piutang daerah tertagih}) + (0.2 \times \% \text{Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan BMD}) + (0.2 \times \% \text{Sertifikasi Aset}) + (0.1 \times \% \text{SKPD tertib pengelolaan BMD}) + (0.1 \times \% \text{Aset daerah yang teridentifikasi dan tercatat dalam e-aset})$. Kategori pengukuran: 1 (Kurang Baik) 2 (Cukup Baik) 3 (Baik) 4 (Sangat Baik). Selanjutnya, sasaran renstra tertuang dalam Tabel 3.2

Tabel 3.2 Sasaran Renstra Badan Pengelolaan Aset Daerah Tahun 2023-2026

| NO | SASARAN RENSTRA | INDIKATOR SASARAN | DEFINISI OPERASIONAL | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- | | | |
|----|---|-------------------------------------|--|--|------|------|------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah melalui Optimalisasi Pemanfaatan | Rasio Utilisasi Terhadap Total Aset | Menghitung perbandingan antara nilai aset yang dikelola oleh Pengelola Barang (PPAD) | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 1.75 |

| NO | SASARAN RENSTRA | INDIKATOR SASARAN | DEFINISI OPERASIONAL | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- | | | |
|----|---|--|--|--|--------------|--------------|--------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Aset, Penagihan Piutang, Penyelesaian Kewajiban Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, dan Pengamanan Barang Milik Daerah | | yang dapat diutilisasi dibandingkan dengan nilai aset yang terdaftar sebagai aset tetap di lingkup Pengelola Barang (PPAD) | | | | |
| 2 | | Jumlah Penerimaan Hasil Pemanfaatan Aset | Jumlah Total Realisasi Penerimaan dari Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan, Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan dan dari Hasil Kerja Sama Daerah | 525958172368 | 481408010281 | 301161602549 | 353243190493 |

Terdapat dua program dalam sasaran Renstra. Program pertama yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan strategi Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja ASN melalui penyediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai guna menunjang kinerja SKPD. Program yang kedua yaitu Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan strategi Melaksanakan Penatausahaan Aset Daerah yang Akuntabel dan Transparan melalui optimalisasi pemanfaatan aset, pemaksimalan penagihan piutang, pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib, pengamanan Barang Milik Daerah serta inventarisasi aset yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3.2 Program dan Kegiatan 2024

Pada Renja 2024, Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta menggunakan program yang terdapat di Renstra Badan Tahun 2023-2026 Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, antara lain:

1. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Renja 2024 Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta juga mencakup 8 sub kegiatan, yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pengelolaan Barang Milik Daerah
8. Peningkatan Pelayanan BLUD

Berdasarkan 2 program dan 8 sub kegiatan, hal tersebut di rinci dengan 30 sub kegiatan yang digunakan baik di BPAD maupun UKPD di bawahnya dan dipertajam dengan aktivitas dalam masing masing subkegiatan.

3.3 Rancangan Akhir RKPD 2024

Pada Rancangan Akhir RKPD, Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta beserta UPT dan Suku Badan mempunyai 2 (dua) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan. Berikut penjabaran Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024 pada Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta:

Tabel 3.2 Rancangan Akhir RKPD 2021

| KODE | PROGRAM / KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET | SATUAN | ANGGARAN |
|--------------------------------------|--|--|---|--------|---------|-----------------|
| BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH | | | | | | |
| 5.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | |
| 5.02.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu | 100 | % | |
| 5.02.01.1.01.0001 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 | Dokumen | 84,000,000 |
| 5.02.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan | 4 | Indeks | |
| 5.02.01.1.02.0001 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 265 | Orang | 147,746,731,542 |
| 5.02.01.1.02.0003 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 100 | Dokumen | 400,000,000 |
| 5.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | |
| 5.02.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 | Paket | 2,135,539,706 |
| 5.02.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 | Paket | 19,162,374 |

| KODE | PROGRAM / KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET | SATUAN | ANGGARAN |
|---------------------|--|---|---|--------|---------|---------------|
| 5.02.01.1.06.00 04 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 3 | Paket | 43,104,075 |
| 5.02.01.1.06.00 05 | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 | Paket | 151,197,318 |
| 5.02.01.1.06.00 07 | | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 2 | | 2,004,300,000 |
| 5.02.01.1.06.00 08 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 2 | Laporan | 24,750,000 |
| 5.02.01.1.06.00 09 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 4 | Laporan | 1,288,800,000 |
| 5.02.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien | 4 | Indeks | |
| 5.02.01.1.07.00 06 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 2 | Unit | 5,151,605,505 |
| 5.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 | Indeks | |
| 5.02.01.1.08.00 03 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 | Laporan | 428,051,520 |
| 5.02.01.1.08.00 04 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 8 | Laporan | 1,339,847,263 |
| 5.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | |
| 5.02.01.1.09.00 02 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 40 | Unit | 750,609,525 |
| 5.02.01.1.09.00 06 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 50 | Unit | 62,132,694 |
| 5.02.03 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | | | | | |
| 5.02.03.1.01 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | | Indeks Kepuasan Pengelolaan Barang Milik Daerah | 4 | Indeks | |
| 5.02.03.1.01.00 03 | | Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | 2 | Dokumen | 168,000,000 |
| 5.02.03.1.01.00 04 | | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | 8 | Dokumen | 1,144,625,002 |

| KODE | PROGRAM / KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET | SATUAN | ANGGARAN |
|--|--|---|--|--------|---------|----------------|
| 5.02.03.1.01.0005 | | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | 2 | Laporan | 1,807,355,000 |
| 5.02.03.1.01.0006 | | Inventarisasi Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah | 1 | Laporan | 2,476,630,000 |
| 5.02.03.1.01.0007 | | Pengamanan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah | 5 | Laporan | 17,446,783,854 |
| 5.02.03.1.01.0008 | | Penilaian Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah | 2 | Laporan | 10,262,923,500 |
| 5.02.03.1.01.0010 | | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 1 | Dokumen | 784,702,836 |
| 5.02.03.1.01.0011 | | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 2 | Laporan | 2,050,602,000 |
| 5.02.03.1.01.0013 | | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah | 500 | Orang | 95,286,900 |
| SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH - JAKPUS | | | | | | |
| 5.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | |
| 5.02.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan | 4 | Indeks | |
| 5.02.01.1.02.0003 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 | Dokumen | 3,000,000 |
| 5.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum | 4 | Indeks | |
| 5.02.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 | Paket | 49,047,837 |
| 5.02.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 | Paket | 139,162,432 |
| 5.02.01.1.06.0004 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 | Paket | 36,713,250 |
| 5.02.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 | Paket | 19,034,280 |
| 5.02.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 | Paket | 323,800,000 |
| 5.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 | Indeks | |
| 5.02.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, | 1 | Paket | 1,921,963,528 |

| KODE | PROGRAM / KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET | SATUAN | ANGGARAN |
|---|--|---|--|--------|---------|---------------|
| | | Sumber Daya Air dan Listrik | Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |
| 5.02.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 | Paket | 6,205,608,376 |
| 5.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 | Indeks | |
| 5.02.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 | Unit | 912,805,387 |
| 5.02.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 | Unit | 1,847,842,491 |
| 5.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 | Indeks | |
| 5.02.01.1.09.0011 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 | Unit | 7,278,536 |
| 5.02.03 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | | | | | |
| 5.02.03.1.01 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | | Indeks Kepuasan Pengelolaan Barang Milik Daerah | 4 | Indeks | |
| 5.02.03.1.01.0007 | | Pengamanan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah | 1 | Laporan | 6,604,257,671 |
| 5.02.03.1.01.0010 | | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 1 | Dokumen | 6,487,728 |
| 5.02.03.1.01.0011 | | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 2 | Laporan | 672,000,000 |
| SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH - JAKUT | | | | | | |
| 5.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | |
| 5.02.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan | 4 | Indeks | |
| 5.02.01.1.02.0003 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 | Dokumen | 5,000,000 |
| 5.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum | 4 | Indeks | |
| 5.02.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan | Jumlah Paket Peralatan dan | 2 | Paket | 449,945,227 |

| KODE | PROGRAM / KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET | SATUAN | ANGGARAN |
|--|--|---|--|--------|---------|---------------|
| | | Perlengkapan Kantor | Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |
| 5.02.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 | Paket | 34,605,605 |
| 5.02.01.1.06.0004 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 3 | Paket | 12,285,000 |
| 5.02.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 | Paket | 20,857,859 |
| 5.02.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 4 | Laporan | 292,500,000 |
| 5.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| 5.02.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 5 | Laporan | 355,217,094 |
| 5.02.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 4 | Laporan | 1,480,883,817 |
| 5.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| 5.02.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 50 | Unit | 46,774,619 |
| 5.02.01.1.09.0011 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 10 | Unit | 63,036,900 |
| 5.02.03 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | | | | | |
| 5.02.03.1.01 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | | Indeks Kepuasan Pengelolaan Barang Milik Daerah | 4 | Indeks | |
| 5.02.03.1.01.0007 | | Pengamanan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah | 1 | Laporan | 3,873,315,240 |
| 5.02.03.1.01.0010 | | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 1 | Dokumen | 11,689,600 |
| 5.02.03.1.01.0011 | | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 2 | Laporan | 672,000,000 |
| SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH - JAKBAR | | | | | | |
| 5.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | |
| 5.02.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan | 4 | Indeks | |

| KODE | PROGRAM / KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET | SATUAN | ANGGARAN |
|---------------------|--|---|--|--------|---------|---------------|
| 5.02.01.1.02.0003 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 25 | Dokumen | 13,000,000 |
| 5.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum | 4 | Indeks | |
| 5.02.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 | Paket | 112,814,706 |
| 5.02.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 | Paket | 20,855,224 |
| 5.02.01.1.06.0008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 2 | Laporan | 7,215,000 |
| 5.02.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 4 | Laporan | 606,420,000 |
| 5.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 | Indeks | |
| 5.02.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 2 | Laporan | 109,428,196 |
| 5.02.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 | Laporan | 493,627,939 |
| 5.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 | Indeks | |
| 5.02.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 42 | Unit | 39,787,883 |
| 5.02.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 | Unit | 788,431,189 |
| 5.02.03 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | | | | | |
| 5.02.03.1.01 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | | Indeks Kepuasan Pengelolaan Barang Milik Daerah | 4 | Indeks | |
| 5.02.03.1.01.0007 | | Pengamanan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah | 1 | Laporan | 3,281,024,390 |
| 5.02.03.1.01.0010 | | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 1 | Dokumen | 12,975,456 |
| 5.02.03.1.01.0011 | | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 2 | Laporan | 1,008,000,000 |

| KODE | PROGRAM / KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET | SATUAN | ANGGARAN |
|--|---|--|--|--------|---------|----------------|
| SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH - JAKSEL | | | | | | |
| 5.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | |
| 5.02.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan | 4 | Indeks | |
| 5.02.01.1.02.0003 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 | Dokumen | 6,000,000 |
| 5.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum | 4 | Indeks | |
| 5.02.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 | Paket | 49,627,479 |
| 5.02.01.1.06.0004 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 3 | Paket | 13,645,800 |
| 5.02.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 | Paket | 3,902,027 |
| 5.02.01.1.06.0008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 | Laporan | 13,645,800 |
| 5.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 | Indeks | |
| 5.02.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 | Laporan | 1,813,011,350 |
| 5.02.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 | Laporan | 5,570,943,883 |
| 5.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 | Indeks | |
| 5.02.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 50 | Unit | 139,070,637 |
| 5.02.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 6 | Unit | 4,331,844,959 |
| 5.02.01.1.09.0011 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 | Unit | 244,147,435 |
| 5.02.03 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | | | | | |
| 5.02.03.1.01 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | | Indeks Kepuasan Pengelolaan Barang Milik Daerah | 4 | Indeks | |
| 5.02.03.1.01.0007 | | Pengamanan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah | 1 | Laporan | 18,018,793,191 |

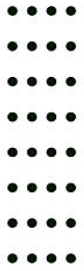
| KODE | PROGRAM / KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET | SATUAN | ANGGARAN |
|--|--|---|--|--------|---------|---------------|
| 5.02.03.1.01.0010 | | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 1 | Dokumen | 113,844,800 |
| 5.02.03.1.01.0011 | | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 1 | Laporan | 840,000,000 |
| SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH - JAKTIM | | | | | | |
| 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | |
| 5.02.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan | 4 | Indeks | |
| 5.02.01.1.02.0003 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 | Dokumen | 7,500,000 |
| 5.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum | 4 | Indeks | |
| 5.02.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 | Paket | 104,157,395 |
| 5.02.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 | Paket | 4,758,811 |
| 5.02.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 | Laporan | 357,450,000 |
| 5.02.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien | 4 | Indeks | |
| 5.02.01.1.07.0006 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 | Unit | 15,049,280 |
| 5.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 | Indeks | |
| 5.02.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 | Laporan | 303,529,920 |
| 5.02.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 | Laporan | 2,609,176,249 |
| 5.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 | Indeks | |
| 5.02.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 34 | Unit | 61,862,100 |

| KODE | PROGRAM / KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET | SATUAN | ANGGARAN |
|---|---|---|--|--------|---------|---------------|
| 5.02.01.1.09.00 09 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 | Unit | 1,513,029,900 |
| 5.02.03 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | | | | | |
| 5.02.03.1.01 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | | Indeks Kepuasan Pengelolaan Barang Milik Daerah | 4 | Indeks | |
| 5.02.03.1.01.00 07 | | Pengamanan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah | 1 | Laporan | 4,342,035,578 |
| 5.02.03.1.01.00 10 | | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 1 | Dokumen | 5,844,800 |
| 5.02.03.1.01.00 11 | | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 1 | Laporan | 1,008,000,000 |
| SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH KABUPATEN - KEP. SERIBU | | | | | | |
| 5.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | |
| 5.02.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan | 4 | Indeks | |
| 5.02.01.1.02.00 03 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 | Dokumen | |
| 5.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum | 4 | Indeks | |
| 5.02.01.1.06.00 02 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 | Paket | 49,571,812 |
| 5.02.01.1.06.00 03 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 3 | Paket | 12,776,711 |
| 5.02.01.1.06.00 04 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 | Paket | 4,781,700 |
| 5.02.01.1.06.00 05 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 | Paket | 23,896,302 |
| 5.02.01.1.06.00 08 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 2 | Laporan | 1,950,000 |
| 5.02.01.1.06.00 09 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 3 | Laporan | 702,000,000 |
| 5.02.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien | 4 | Indeks | |
| 5.02.01.1.07.00 06 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 2 | Unit | 7,378,836 |
| 5.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa | | Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja | 4 | Indeks | |

| KODE | PROGRAM / KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET | SATUAN | ANGGARAN |
|--|--|---|--|--------|---------|---------------|
| | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| 5.02.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 | Laporan | 70,518,277 |
| 5.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 | Indeks | |
| 5.02.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 50 | Unit | 7,223,325 |
| 5.02.03 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | | | | | |
| 5.02.03.1.01 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | | Indeks Kepuasan Pengelolaan Barang Milik Daerah | 4 | Indeks | |
| 5.02.03.1.01.0006 | | Inventarisasi Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah | 1 | Laporan | 86,807,913 |
| 5.02.03.1.01.0007 | | Pengamanan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah | 3 | Laporan | 2,060,283,411 |
| 5.02.03.1.01.0009 | | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | 1 | Laporan | 43,736,442 |
| 5.02.03.1.01.0010 | | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 1 | Dokumen | 21,868,221 |
| 5.02.03.1.01.0011 | | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 1 | Laporan | 420,000,000 |
| PUSAT PENYIMPANAN BARANG DAERAH | | | | | | |
| 5.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | |
| 5.02.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan | 4 | Indeks | |
| 5.02.01.1.02.0003 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 20 | Dokumen | 3,500,000 |
| 5.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum | 4 | Indeks | |
| 5.02.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 | Paket | 47,961,102 |
| 5.02.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 | Paket | 82,638,456 |
| 5.02.01.1.06.0004 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 3 | Paket | 512,496,000 |
| 5.02.01.1.06.0007 | | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 | Paket | 7,500,000,000 |

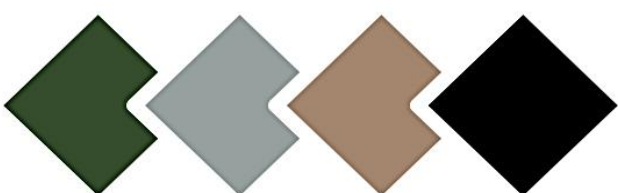
| KODE | PROGRAM / KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET | SATUAN | ANGGARAN |
|---|--|---|---|--------|---------|---------------|
| 5.02.01.1.06.0008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 2 | Laporan | 8,521,760 |
| 5.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 | Indeks | |
| 5.02.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 4 | Laporan | 436,327,417 |
| 5.02.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 4 | Laporan | 4,233,705,570 |
| 5.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 | Indeks | |
| 5.02.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 43 | Unit | 3,667,584,910 |
| 5.02.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 33 | Unit | 17069330 |
| PUSAT DATA DAN INFORMASI ASET | | | | | | |
| 5.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | |
| 5.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum | 4 | Indeks | |
| 5.02.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 | Paket | 47,930,410 |
| 5.02.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 4 | Laporan | 325,000,000 |
| 5.02.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien | 4 | Indeks | |
| 5.02.01.1.07.0006 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 2 | Unit | 1,041,734,432 |
| 5.02.03 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | | | | | |
| 5.02.03.1.01 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | | Indeks Kepuasan Pengelolaan Barang Milik Daerah | 4 | Indeks | |
| 5.02.03.1.01.0009 | | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | 2 | Laporan | 4,017,670,000 |
| UNIT PENGELOLA JAKARTA ASSET MANAGEMENT CENTER | | | | | | |
| 5.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | |
| 5.02.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan | 4 | Indeks | |

| KODE | PROGRAM / KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET | SATUAN | ANGGARAN |
|--------------------------|--|---|--|--------|------------|----------------|
| 5.02.01.1.02.0003 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 100 | Dokumen | 10,600,000 |
| 5.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum | 4 | Indeks | |
| 5.02.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 | Paket | 81,976,253 |
| 5.02.01.1.06.0007 | | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 2 | Paket | 153,424,500 |
| 5.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | |
| 5.02.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 4 | Unit | 50,552,436 |
| 5.02.01.1.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | Indeks Kepuasan Pelayanan BLUD | 4 | Indeks | |
| 5.02.01.1.10.0001 | | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 | Unit Kerja | 38,692,033,976 |
| 5.02.03 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | | | | | |
| 5.02.03.1.01 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | | Indeks Kepuasan Pengelolaan Barang Milik Daerah | 4 | Indeks | |
| 5.02.03.1.01.0010 | | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 4 | Dokumen | 3,144,296,000 |



BAB IV

RENCANA KERJA



4.1 Prioritas Pembangunan Tahun 2024

Guna memberikan arah bagi pembangunan nasional tahun 2024, Pemerintah Pusat telah menetapkan tema RKP Tahun 2024, yaitu “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema tersebut dipandang sebagai upaya untuk memenuhi target-target sasaran akhir RPJMN Tahun 2020–2024, dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh untuk melanjutkan estafet pembangunan periode 2025–2029.

Sesuai dengan arahan tersebut, Badan Pengelola Aset Daerah ikut melaksanakan prioritas pembangunan dengan berpartisipasi dalam prioritas nasional dan prioritas daerah. Prioritas nasional yang dilakukan oleh BPAD yaitu Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik, sedangkan prioritas daerah yang digunakan bertema Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Sehat, Transparan dan Akuntabel.

Prioritas tersebut perlu dicapai dengan menggunakan beberapa strategi. Strategi yang digunakan oleh BPAD dan UKPD dibawahnya dengan melakukan beberapa kegiatan prioritas yang sudah didiskusikan baik dengan BPAD maupun instansi lainnya. Kegiatan tersebut didominasi oleh kegiatan pengamanan aset. Pengamanan aset yang menjadi prioritas BPAD sebagai berikut :

1. Sensus Barang Milik Daerah
2. Inventarisasi Aset FASOS FASUM
3. Digitalisasi Aset Daerah
4. Sertifikasi Aset Tanah Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
5. Pendataan dan Identifikasi Aset Daerah Bermasalah
6. Pengasuransian Aset Bergerak (KDO) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
7. Pengasuransian Gedung/Bangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
8. Pemagaran Tanah Aset Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
9. Penyediaan Papan Nama Aset Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
10. Pengamanan Tanah dan Bangunan Milik Pemprov DKI yang dikuasai oleh Pihak Lain
11. Rekonsiliasi dan Inventarisasi Aset Daerah
12. Pemeliharaan Barang Milik Daerah
13. Pemanfaatan Aset Barang Milik Daerah

4.2 Strategi dan Arah Pembangunan Wilayah

Provinsi DKI Jakarta, terdiri dari 5 (lima) wilayah Kota dan 1 (satu) Kabupaten. Masing-masing wilayah tersebut memiliki karakteristik dan keunggulan yang berbeda-beda. Daya saing kota/ kabupaten dapat optimal jika masing-masing wilayah fokus membangun pada potensi keunggulannya. Oleh karena itu, perlu rumusan prioritas pembangunan dari setiap wilayah kota/kabupaten di DKI Jakarta. Berikut adalah target pembangunan pada masing masing wilayah di tahun 2024. (Tabel 4.1)

Tabel 4.1 Startegi dan Arah Pembangunan BPAD

| SKPD/UKPD | SUBKEGIATAN / AKTIVITAS | JUMLAH | SATUAN | ANGGARAN | KETERANGAN |
|--|---|---------|--------|---------------|---|
| SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH KOTA - JAKPUS | Sertifikasi Aset Tanah Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Lingkup Kota Jakarta Pusat | 242 | Bidang | 3,500,000,000 | |
| SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH KOTA - JAKPUS | Pemagaran Tanah Aset Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat | 1046 | M/Lari | 2,256,416,244 | |
| SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH KOTA - JAKPUS | Penyediaan Papan Nama Aset Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat | 150 | Unit | 744,161,427 | |
| SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH KOTA - JAKPUS | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 88 | Orang | 6,205,608,376 | |
| SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH KOTA - JAKUT | Pemagaran Tanah Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara | 1061.62 | M/Lari | 2,274,428,675 | Pemagaran pada 4 Lokasi terdiri dari : 1. SEKOLAH TUNAS KARYA 2. NCICD MUARA BARU 3. NCICD KALIBARU 4. TAMAN SUNTER JAYA II |
| SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH KOTA - JAKUT | Sertifikasi Aset Tanah Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Lingkup Kota Jakarta Utara | 20 | Bidang | 859,020,000 | |
| SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH KOTA - JAKUT | Penyediaan Papan Nama Aset Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara | 140 | Unit | 739,866,565 | |

| SKPD/UKPD | SUBKEGIATAN / AKTIVITAS | JUMLAH | SATUAN | ANGGARAN | KETERANGAN |
|--|---|--------|--------|----------------|---|
| SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH KOTA - JAKUT | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 21 | Orang | 1,480,883,817 | |
| SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH KOTA - JAKBAR | Pemagaran Tanah Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat | 870 | M/Lari | 2,170,804,343 | Pemagaran pada 3 Lokasi terdiri dari : 1. Kecamatan Tambora 2. Kecamatan Kembangan 3. Sentra Flora Semanan |
| SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH KOTA - JAKBAR | Sertifikasi Aset Tanah Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Lingkup Kota Jakarta Barat | 53 | bidang | 861,777,000 | |
| SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH KOTA - JAKBAR | Penyediaan Papan Nama Aset Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat | 40 | Unit | 198,443,047 | |
| SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH KOTA - JAKBAR | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 7 | Orang | 493,627,939 | |
| SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH KOTA - JAKSEL | Pemagaran Tanah Aset Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan | 7759 | M/Lari | 17,028,839,382 | Pemagaran pada 2 Lokasi terdiri dari : 1. SD Petukangan Selatan 01 2. Lahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ciangir, Tangerang |
| SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH KOTA - JAKSEL | Penyediaan Papan Nama Aset Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan | 50 | Unit | 248,053,809 | |
| SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH KOTA - JAKSEL | Sertifikasi Aset Tanah Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | 95 | Bidang | 741,900,000 | |

| SKPD/UKPD | SUBKEGIATAN / AKTIVITAS | JUMLAH | SATUAN | ANGGARAN | KETERANGAN |
|--|---|--------|--------|---------------|------------|
| | Lingkup Kota Jakarta Selatan | | | | |
| SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH KOTA - JAKSEL | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 79 | Orang | 5,570,943,883 | |
| SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH KABUPATEN - KEP. SERIBU | Penyediaan Papan Nama Aset Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | 20 | Unit | 227,495,299 | |
| SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH KABUPATEN - KEP. SERIBU | Sertifikasi Aset Tanah Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Wilayah Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu | 3 | Bidang | 107,102,661 | |
| SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH KABUPATEN - KEP. SERIBU | Pemagaran Tanah Aset Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Wilayah Kepulauan Seribu | 667 | M/Lari | 1,725,685,451 | |
| SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH KABUPATEN - KEP. SERIBU | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1 | Orang | 70,518,277 | |



BAB V

PENUTUP

PENUTUP

Dokumen Renja Badan Pengelolaan Aset Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Renstra Tahun 2023-2026. Fungsi Dokumen Renja Tahun 2024 adalah sebagai pedoman operasional dalam melaksanakan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Aset Daerah sebagai upaya mencapai Tujuan dan Sasaran Tahun 2024.

Diharapkan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta dapat berjalan dengan baik, lancar dan transparan. Badan Pengelolaan Aset Daerah diharapkan mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi yang terjadi di DKI Jakarta sehingga pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Aset Daerah untuk percepatan pencapaian Sasaran menjadi lebih baik dan sesuai dengan target yang tercantum dalam RPD 2023-2026 dapat terwujud secara efisien dan efektif.

Jakarta, 21 Juli 2023
Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta



Lusiana Herawati
NIP. 196706131988032002